

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, Hasanuddin Z. 2007. *Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya*. Edisi ke-3. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harsono, Boedi. 2003. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Harsono, Boedi. 2012. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cet. ke-14. Jakarta: Djambatan.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Li, Tania Murray. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press.
- Marzuki, Peter. M. 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- McCarthy, John F., & Kathryn Robinson (Eds.). 2017. *Land, Livelihoods, and Institutions: The Political Economy of Land and Agrarian Change in Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24/1997)*. Bandung: Mandar Maju.
- Rachman, Noer Fauzi. 2012. *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safitri, Myrna A., ed. 2011. *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Kritik terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: HuMa.
- Santoso, Urip. 2017. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Cet. ke-7. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sumardjono, Maria S. W. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sumardjono, Maria S. W., dkk. 2019. *Mediasi dalam Konflik Pertanahan: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sebagai Alternatif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumarto, Sudarno, et al. 2002. *Evaluasi Dampak Pendaftaran Tanah secara Sistematis melalui PAP*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. 2003. "The Agrarian Question in Indonesia." *Dalam Dinamika Politik Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM & HUMA.

## JURNAL

- Aditya, Trias. 2024. "Dari Kadaster Legal ke Kadaster Multifungsi: Arah Modernisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia." *Jurnal Geomatika dan Pertanahan*, 11(2), 89-102.
- Djogo, Agustinus St. 2018. "Problem Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Solusi Percepatannya." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 125–135.
- Enemark, Stig. 2009. "From Cadastre to Land Governance." Makalah dipresentasikan pada FIG/World Bank Conference: Land Governance in Support of the Millennium Development Goals, Washington D.C., 9-10 Maret.
- Inradewi, I. G. A. A. D., & I. M. Sukresna. 2020. "Kendala Yuridis dan Sosiologis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 215-219.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2018. "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101.

Nurhuda, M. F. 2018. “*Evaluasi Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah.*” *Ganec Swara*, 12(1), 55-61.

### **HASIL PENELITIAN / TUGAS AKHIR / SKRIPSI**

Nurrohman, Septian. 2022. *Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Sitanggang, Fransiskus T. M. 2017. *Problematika Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Udytama, I Wayan Wahyu Wira. 2023. *Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah*. Tugas Akhir, Universitas Mahasaraswati, Bali.

### **INTERNET DAN SUMBER LAIN**

Independent Evaluation Group. 2014. *Project Performance Assessment Report: Indonesia Land Management and Policy Development Project*. Report No. 85809. Washington, D.C.: The World Bank. Diakses pada 19 Juli 2025, dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/407951468278683358/txt/858090PPAR0P0647280Box382166B00OUO090.txt>

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). 2023. *Catatan Akhir Tahun 2023: Konflik Agraria dan Ancaman terhadap Ruang Hidup Rakyat*. Jakarta: KPA. Diakses pada 19 Juli 2025, dari <https://www.kpa.or.id/image/2024/01/catahu-2023-kpa.pdf>

The World Bank. 1994. *Memorandum and Recommendation of the President of the International Bank for Reconstruction and Development to the Executive Directors on a Proposed Loan to the Republic of Indonesia for a Land Administration Project*. Report No. P-6292-IND. Washington, D.C.:

The World Bank. Diakses pada 18 Juli 2025, dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/791061468266180238/txt/multi0page.txt>

The World Bank. 2004. *Project Appraisal Document on a Proposed Loan and a Credit to the Government of the Republic of Indonesia for a Land Management and Policy Development Project*. Report No. 28178-IND. Washington, D.C.: The World Bank. Diakses pada 19 Juli 2025, dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/616251468771663000/txt/281780ID.txt>

The World Bank. 2024. *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (P180860)*. Diakses pada 5 Juli 2025, dari <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P180860>.

The World Bank. 2024. *Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) - Integrated Land Administration and Spatial Planning Project*. Washington, D.C.: The World Bank. Diakses pada 20 Juli 2025, dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099091124045096759/txt/P180860-f217734f-aa5e-4ed8-91cc-0e61dd8769a6.txt>

The World Bank. 2024. *Project Appraisal Document on a Proposed Loan in the Amount of JPY 94,877.7 Million (US\$653 Million Equivalent) to the Republic of Indonesia for a Integrated Land Administration and Spatial Planning Project*. Report No: PAD00063. Washington, D.C.: The World Bank. Diakses pada 20 Juli 2025, dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099091324104039393/txt/BO5IB12f3662d504a1b155134dc6a350cf9.txt>

The World Bank. 2024. *Project Information Document (PID) - Integrated Land Administration and Spatial Planning Project*. Report No: PIDA0074. Washington, D.C.: The World Bank. Diakses pada 20 Juli 2025, dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099040424010018204/pdf/P1808601a61b34091a9fa1dedcbffb3279.pdf>

The World Bank. 2024. *Stakeholder Engagement Framework (SEF) Draft - Integrated Land Administration and Spatial Planning*. Disiapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jakarta. Diakses pada 20 Juli 2025, dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099032224000536958/pdf/P1808601a0a3f20a41a780167ac7af3d650.pdf>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 281).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5786).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683).

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 110).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1284).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1202 Tahun 2021).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77).

### **Putusan Pengadilan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 35/PUU-X/2012, Perihal Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 16 Mei 2013.